

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, oleh karena itu kondisi ekonomi dalam suatu negara merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pemerintah dari setiap negara berupaya meningkatkan tatanan ekonomi agar perekonomian di Indonesia semakin kokoh. Dalam menjalankan perekonomian Indonesia, tentunya pemerintah memerlukan bantuan atas kontribusi rakyat dalam upaya meningkatkan derajat potensi ekonomi di dunia internasional. Di negara Indonesia, ada 3 (tiga) pelaku ekonomi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi.

Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Dengan adanya kontribusi positif maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu koperasi harus mampu mengembangkan usahanya dengan produktif. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 33 ayat 1 tersebut adalah sebagai berikut:

**“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”**

Hal tersebut menggambarkan bahwa di dalam organisasi koperasi mendukung asas gotong royong untuk mencapai suatu tujuan.

Tujuan koperasi yaitu untuk meningkatkan promosi ekonomi anggota khususnya masyarakat pada umumnya. Dengan demikian koperasi menjalankan usahanya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota. Sehingga koperasi dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota. Koperasi merupakan badan usaha yang mandiri dan tangguh dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka pembangunan koperasi menjadi wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efektif dan efisien. Tujuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab II pasal 3,

**“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”**

Berdasarkan pernyataan diatas koperasi merupakan suatu badan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan anggota terutama dalam segi ekonomi, karena koperasi lebih mementingkan kesejahteraan anggota. Untuk mencapai tujuan tersebut maka koperasi harus mampu meningkatkan kualitas baik dalam kemampuan organisasi, permodalan maupun peningkatan dalam semangat berkoperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, namun tidak hanya koperasi yang berperan aktif dalam kegiatan usahanya, partisipasi anggota juga sangat diperlukan untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjalankan kegiatan usaha yang ada di koperasi. Dalam organisasi koperasi, anggota koperasi berstatus sebagai pemilik (*owner*) dan pelanggan

(*user*) atau dapat dikatakan dengan *dual identity*. sehingga apabila anggota sebagai pelanggan tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi maka koperasi tidak akan maju. Oleh karena itu, partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa keberhasilan usaha koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi anggota.

Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) merupakan koperasi yang berdiri berdasarkan kesamaan anggotanya yaitu Pegawai Negeri Kota Bandung. Koperasi ini berdiri pada tanggal 11 Mei 1962, pada awalnya bernama Koperasi Pegawai Otonom Kota Praja yang disingkat KPOKP. Badan Hukum paling akhir No. 518/PAD-02-DISKOP/2005. Yang berkedudukan di Jl. Wastukencana No.5 Bandung. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) memiliki 2 (dua) unit usaha, yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam serta Unit Usaha Perniagaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KPKB memerlukan modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi. Salah satu bentuk dari penggunaan modal adalah pengadaan aktiva. Aktiva merupakan suatu keberadaan bagi koperasi yang merupakan wujud dari manfaat ekonomi masa depan, yang mana aktiva tersebut memberikan sumbangan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan setara kas pada koperasi. Aktiva sendiri dapat diartikan sebagai harta atau kekayaan (*asset*) yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu (Kasmir 2017:76). Demi tercapainya tujuan koperasi maka koperasi harus mampu melaksanakan kegiatan usahanya secara efektif khususnya dalam pengelolaan aktiva agar koperasi berperan aktif di dalam dunia usaha yang persaingannya semakin ketat.

Penggunaan aktiva merupakan hal yang sangat penting bagi suatu koperasi karena dengan pengelolaan aktiva yang baik maka koperasi dapat beroperasi dengan optimal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun jika aktiva berlebihan maka akan mengakibatkan aktiva tersebut menjadi tidak produktif dan sebaliknya jika koperasi kekurangan aktiva itu merupakan suatu hal yang tidak baik karena dapat menghambat ke pendapatan yang diperoleh koperasi.

Supaya aktiva dapat beroperasi dengan baik, maka perlu dilakukan suatu pengendalian penggunaan aktiva secara efektif agar dapat menghasilkan *return on asset* yang tinggi. Efektivitas penggunaan aktiva merupakan suatu ukuran tentang bagaimana koperasi dapat menggunakan aktiva dengan baik untuk mencapai tujuan koperasi. Efektivitas penggunaan aktiva dapat dilihat berdasarkan kemampuan koperasi dalam mengelola aktivanya dalam bidang penjualan, persediaan dan perputaran piutang pada koperasi.

Dengan memperhatikan efektivitas penggunaan aktiva diharapkan dapat mendapatkan keuntungan bagi koperasi. Keuntungan yang diperoleh koperasi dapat diukur efektivitas perusahaan melalui perhitungan *return on asset*.

*Return On Asset* suatu koperasi menunjukkan perbandingan antara SHU yang diperoleh dengan total aktiva, pentingnya *Return On Asset* (ROA) di koperasi adalah untuk melihat apakah koperasi telah menjalankan kegiatan usahanya dengan optimal atau belum, yang manfaatnya untuk kesejahteraan anggota. untuk meningkatkan *return on asset* maka koperasi harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan asset. Namun asset tidak akan menghasilkan pendapatan jika tidak menggunakan

biaya, salah satu cara untuk mengefektifkan aset di koperasi yaitu dengan cara mereduksi aset yang tidak diperlukan. Maka dengan adanya reduksi terhadap aset yang tidak diperlukan maka biaya yang dikeluarkan akan berkurang dan perolehan SHU yang didapat akan meningkat. Sehingga efektivitas dapat tercapai dan *return on asset* pun akan meningkat.

Dalam hal ini koperasi juga harus bisa mempertimbangkan tinggi rendahnya *return on asset* yang dipengaruhi oleh SHU dengan jumlah total aset yang dimiliki oleh koperasi. Untuk lebih jelasnya berikut ini perkembangan total aset, perolehan sisa hasil usaha dan perkembangan *return on asset* pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung :

**Tabel 1. 1 Perkembangan Total Aset, SHU, dan *Return On Aset* (ROA) pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) Tahun 2015-2019.**

| Tahun | Total Aset (Rp)      | N/T (%) | SHU (Rp)          | N/T (%) | ROA (%) | N/T (%) |
|-------|----------------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|
| 2015  | Rp 64.180.744.389,91 | -       | Rp 302.087.679,70 | -       | 0,47    | -       |
| 2016  | Rp 68.728.030.217,22 | 0,07    | Rp 392.740.427,00 | 0,30    | 0,57    | 0,21    |
| 2017  | Rp 78.591.906.095,84 | 0,14    | Rp 510.181.516,08 | 0,30    | 0,65    | 0,14    |
| 2018  | Rp 84.022.288.250,54 | 0,07    | Rp 610.357.456,32 | 0,20    | 0,73    | 0,12    |
| 2019  | Rp 82.908.237.616,60 | -0,01   | Rp 929.032.105,35 | 0,52    | 1,12    | 0,54    |

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total aset Koperasi Pegawai Kota Bandung (KPKB) mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 total aset mengalami kenaikan yaitu sebesar 7% dari tahun 2015. Pada tahun 2017 total aset mengalami kenaikan dari tahun 2016, kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 14% dari tahun 2016. Pada tahun 2018 total aset mengalami kenaikan yaitu sebesar 7% dari tahun

2017. Dan pada tahun 2019 total aset mengalami penurunan sebesar 0,1% dari tahun 2018.

Perkembangan SHU juga cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan 30% dari tahun 2015, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sama dari tahun 2016 yaitu sebesar 30%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 20% dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 52% dari tahun 2018.

Sama halnya perkembangan total aset dan SHU dengan *return on asset* cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 *return on asset* mengalami kenaikan yaitu sebesar 21% dari tahun 2015, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar 14% dari tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2018 *return on asset* mengalami kenaikan sebesar 12% dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 54%.

Berikut ini dapat diketahui standar pengukuran *return on asset* (ROA) menurut Peraturan Menteri KUKM No.06 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Standar Return On Aset (ROA)**

|   | <b>Tingkat Return On Aset</b> | <b>Nilai</b> | <b>Kriteria</b> |
|---|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | $\geq 10\%$                   | 100          | Tinggi          |
| 2 | $7,5\% \leq X < 10\%$         | 75           | Cukup           |
| 3 | $5\% \leq X < 7,5\%$          | 50           | Kurang          |
| 4 | $< 5\%$                       | 25           | Rendah          |

Sumber: Peraturan Menteri KUKM No.06 Tahun 2006

Standar *Return On Asset* (ROA) diatas dapat dijadikan tolak ukur apakah koperasi telah bekerja secara efisien atau tidak. Jika hasil perhitungan berada di bawah

standar *return on asset* maka koperasi dapat dikatakan kurang baik. Apabila nilai *return on asset* rendah maka dapat disimpulkan bahwa koperasi tersebut dibawah standar dan mengalami suatu masalah dalam pengelolaan asset nya. Hal ini di duga bahwa koperasi tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan asset nya sehingga koperasi tidak bisa menciptakan promosi ekonomi anggota di lihat dari SHU bagian anggota.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, *return on asset* di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya apabila dibandingkan dengan standar *Return On Asset* (ROA) menurut Peraturan Menteri KUKM No.06 Tahun 2006 bahwa Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) ini memiliki kriteria di bawah standar. Dilihat dari nilai *Return On Asset* (ROA) Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang rata-rata di bawah 5% atau dapat dikatakan tidak sehat menurut Peraturan Menteri KUKM No.06 Tahun 2006. Hal ini tentunya berdampak pada pendapatan yang diperoleh koperasi, meskipun tujuan koperasi bukan mencari profit namun dengan kurangnya SHU perkembangan koperasi akan terhambat dan kesejahteraan anggota akan terganggu. Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Aset Hubungannya dengan *Return On Asset* (ROA)”** pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Efektivitas Penggunaan Aset pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana tingkat Efisiensi Penggunaan Aset pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
3. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya tingkat Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Aset pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
4. Bagaimana hubungan tingkat Efektivitas dan tingkat Efisiensi Penggunaan Aset dengan *Return On Asset* pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh tentang Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Aset hubungannya dengan *Return On Asset* (ROA) pada “Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung”.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Aset pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Efisiensi Penggunaan Aset pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.



3. Untuk mengetahui Faktor – faktor yang mempengaruhi rendahnya Tingkat Efektivitas dan Efisiensi pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui hubungan tingkat Efektivitas dan tingkat Efisiensi Penggunaan Aset dengan *Return On Asset* pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis ini diharapkan menjadi pedoman dan memberikan pengetahuan, informasi dalam pengembangan ilmu koperasi, serta khususnya dalam bidang manajemen keuangan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan aset hubungannya dengan *return on asset* (ROA).

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Bagi Pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB), diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan untuk menjadikan bahan evaluasi bagi kegiatan usaha koperasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan aset hubungannya dengan *Return On Asset* (ROA).

IKOPIN